



## JCW Minta KPK Tangani Kasus Mentel

**YOGYA, TRIBUN** - Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba mengirimkan surat kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui jasa PT Pos Indonesia, Selasa (12/9).

Kamba menjelaskan, surat tersebut berisikan permohonan agar KPK melakukan koordinasi dan supervisi ke Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta terkait proses penyelidikan dugaan korupsi pada kasus Menara Telekomunikasi (Mentel).

Seperti diketahui, Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta telah memanggil beberapa mantan anggota Pansus Perda Mentel dan fiber optik untuk dimintai keterangan.

"Kita minta, sekali-sekali KPK turun ke Yogyakarta, ini ada kasus yang perlu dikordinasikan dengan kejaksaan terkait adanya dugaan

korupsi pada kasus mentel ini," ujar Kamba.

Ia menduga banyak pihak bermain dalam kasus ini. Menurutnya, informasi yang perlu diketahui oleh KPK adalah adanya perbedaan soal jumlah mentel yang sudah berdiri di Kota Yogyakarta.

Data dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta menyebut ada 104 yang telah mengantongi izin. Sementara dalam draft Perda yang sedang digodok oleh DPRD menyebut 222 telah berdiri.

"Artinya, ada selisih jumlah mencapai 118, apakah itu legal atau ilegal itu patut dipertanyakan. Kita meminta KPK untuk turun tangan karena banyak pelanggaran yang dibiarkan," jelasnya.

Sebelumnya, pada Kamis (31/8/2017) Kejaksaan Negeri Kota Yogyakarta memeriksa atau dimintai keterangan tujuh orang yakni Ketua

DPRD Kota Yogyakarta, Plt Sekretaris dewan Kota Yogyakarta, Kabag Perundang-undangan DPRD Kota Yogyakarta, dan empat mantan anggota Panitia Khusus (Pansus) Raperda Menara Telekomunikasi di Kota Yogyakarta.

Pemeriksaan tersebut terkait dengan adanya laporan dari masyarakat yang mempersoalkan adanya dugaan perbuatan melawan hukum dalam proses pembahasan Raperda yang pada tanggal 17 Juli 2017 sudah menjadi Perda Nomor 7 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Fiber Optik.

**Kasus Lainnya**

Baharuddin Kamba menyebut, langkah permohonan KPK untuk turun tangan ini agar segala kasus dugaan korupsi di Kota Yogyakarta bisa tuntas, tidak menggantung.

**Kita minta, sekali-sekali KPK turun ke Yogyakarta, ini ada kasus yang perlu dikordinasikan dengan kejaksaan terkait adanya dugaan korupsi pada kasus mentel ini**

**Baharuddin Kamba**  
Jogja Corruption Watch

● ke halaman 14

### JCW Minta KPK Tangani Kasus

● Sambungan Hal 13

Ia mengatakan, di Kota Yogyakarta ada kasus yang mangkrak dan tidak jelas penyelesaiannya, yakni kasus pengadaan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pada RS Wirosaban Kota Yogyakarta pada 2015.

Saat itu pihak Kejari Kota Yogyakarta telah memintai keterangan dari sejumlah pihak atas proyek IPAL di RS Wirosaban milik Pemerintah Kota Yogyakarta dengan anggaran Rp2,3 miliar. Namun, hingga kini hasil dari pemeriksaan atas kasus tersebut, tidak jelas dan hanya men-

guap begitu saja.

"Makanya kami minta KPK turun tangan langsung untuk berkordinasi dan mensupervisi dengan Kejari Kota Yogyakarta sesuai dengan amanat UU KPK agar tidak mandek," tutur Kamba.

Dengan ikut sertanya KPK, diharapkan penanganan kasus ini berjalan dengan adil dan transparan, jika nantinya ada unsur tindak pidana korupsi (suap, gratifikasi) harus diusut tuntas.

"Artinya tidak hanya pada proses pembahasan Raperda tetapi juga dalam hal pembiaran terhadap menara telekomunikasi yang tidak berizin," tutupnya. (gii)

**KIRIM** - Koordinator Divisi Pengaduan Masyarakat dan Monitoring Peradilan Jogja Corruption Watch (JCW) Baharuddin Kamba saat mengirimkan surat kepada Pimpinan KPK, Selasa (12/9)

Instansi

1. Bag. Hukum
2. Din. PM dan Perizinan

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Forpi			
3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 30 September 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005